

## TAJUK RENCANA

### Menyiapkan Kembali Belajar Tatap Muka

**SEJUMPUT** rasa bahagia merona di wajah remaja SMA. Rindu kembali bertemu teman di sekolah, tampak menyenangkannya. Sekali pun kadang bertemu satu dua, namun kembali bertemu dan belajar bersama dalam sebuah ruang bernama kelas dalam waktu ditentukan, akan memberi nuansa lain, setelah 8 bulan belajar daring. Apalagi mereka yang berada di kelas X dan XI, yang sedang menikmati indahnyanya masa remaja.

Yang berada di kelas XII? Setelah lebih dari satu semester meninggalkan kelas tatap muka, sebagian merasakan kerinduan untuk menikmati masa remaja SMA, yang tinggal satu semester. Sebagian lain yang sudah menikmati belajar daring, tidak lagi tertarik belajar tatap muka. Mereka bahkan dengan serius fokus belajar menyiapkan masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Kembali belajar tatap muka justru dikawatirkan akan mengganggu fokusnya, kalau kemudian menghadirkan banyak tugas dari guru.

Wajar kehadiran ketika sebuah kebijakan mengundang pro-kontra. Apalagi ketika sasaran kebijakan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan angka kasus penambahan pasien positif corona yang masih tinggi, orang tua dengan anak-anak yang masih berada di bangku SD, merasa khawatir dengan kebijakan sekolah tatap muka. Di sisi lain kelegaan tergambar di wajah orang tua yang selama ini merasa kedodoran mendampingi belajar anak-anaknya.

Bersyukur, kebijakan sekolah kembali belajar tatap muka yang dikeluarkan Mendikbud Nadiem Makarim Jumat (20/11) lalu bukanlah sebuah instruksi keharusan. Pelaksanaan kebijakan ini bahkan luwes. Kali ini, Nadiem cukup bijak dengan menyebutkan bahwa pemda-lah yang paling tahu kondisi wilayahnya. Sehingga keputusan tergantung izin pemda, kantor wilayah

(pendidikan) atau kantor kementerian agama (KR, 21/11). Tentu saja, keputusan tidak bisa mengabaikan rekomendasi Satgas Penanganan Covid-19 daerah.

Semua ini harus dipertimbangkan dan dihitung dengan matang. Karena seperti diingatkan Ketua Sasgag Covid-19 Doni Monardo dalam press conference secara daring Jumat lalu, masih ada ancaman penularan Covid-19 yang besar setelah sekolah melakukan belajar tatap muka. Bahkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan, Menteri Nadiem harus mempertimbangkan matang, jangan cuma ingin anak senang.

Tentu! Proses pembelajaran tatap muka di sekolah butuh persiapan yang panjang. Tetapi faktanya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat 57,52% dari 532.000 satuan pendidikan belum mengisi formulir daftar periksa kesiapan sekolah. Padahal salah satu syarat pembukaan sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 harus mengisi formulir daftar periksa terlebih dahulu (tirto.co.id, 20/11). Ketika diserahkan daerah, lalu bagaimana daerah menyiapkan ini?

Yogya adalah Kota Pelajar, Kota Pendidikan. Di kota ini hadir pelajar dan tentu juga mahasiswa dari seantero Nusantara. Tentu tidak cukup sekadar menyosialisasikan 3M : mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk belajar di sekolah. Persiapannya tidak sekadar infrastruktur namun juga suprastruktur, tidak hanya fisik tetapi juga psikis siswa, guru dan karyawan bahkan orang tua murid. Semua berperan, semua menentukan. Dan semua harus disiapkan serta dipertimbangkan dengan detail dan matang. Jangan sampai euphoria belajar tatap muka membuahkan bencana. □

# Tantangan Penggunaan Sirekap pada Pilkada

## Muhammad Johan Komara

nya 15 November 2017 menyatakan bahwa Sipol bukan instrumen yang bersifat wajib. Dan kemudian memerintahkan KPU agar menerima kembali berkas parpol dengan melakukan penelitian secara fisik atau manual.

Agar Sirekap dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, perlu kiranya diperhatikan beberapa hal. Pertama KPU perlu meyakinkan semua pihak bahwa penggunaan Sirekap telah memiliki dasar



KR-JOKO SANTOSO

Hasil dan rincian perolehan suara di TPS akan dituangkan dalam kertas ukuran plano yang disebut sebagai Form C-Hasil KWK. Form tersebut lalu di foto dan diunggah ke server KPU dengan menggunakan salah satu ponsel pintar anggota KPSS yang sudah diregistrasi. Sirekap akan membaca dan mengkonversi data berdasarkan foto yang diambil di TPS dengan menggunakan model Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Mark Recognition (OMR). OCR akan mengkonversi data dalam bentuk image menjadi teks. Sedangkan OMR akan membaca data yang ditulis dengan tanda tertentu (seperti dilingkari penuh, pada jawaban soal ujian).

### Kepercayaan Publik

Secara umum penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas yang berujung pada peningkatan kepercayaan publik. Namun dalam konteks Pemilu, penggunaan TIK bisa jadi justru sebaliknya yaitu diperulakan kepercayaan publik atau setidaknya kepercayaan para pembuat regulasi terlebih dahulu agar TIK bisa dipergunakan dengan baik.

Dalam perjalanannya Sipol digugat ke Bawaslu oleh 10 partai politik yang tereliminasi sebagai peserta pemilu yang meminta agar Sipol tidak dijadikan instrumen wajib. Bawaslu dalam putusan-

hukum yang cukup kuat di UU Pilkada. Sehingga potensi gugatan terhadap Sirekap dikemudian hari dapat dihindari ataupun kalau ada bisa dimenangkan oleh KPU.

Kedua KPU perlu memastikan bahwa aplikasi Sirekap sudah tersertifikasi dan siap pakai. Sebagai catatan bahwa sistem operasi Windows, Android, IOS dan aplikasi turunannya selalu melakukan security update. Karena dalam perjalanannya, terdapat berbagai celah keamanan yang bisa disalahgunakan oleh

para penjahat digital.

### Secara Ketat

Ketiga, perlu manajemen bandwidth secara ketat. Sejak Pemilu 2014, aplikasi Sidalih seringkali mengalami slow response bahkan connection time out ketika para operator di 514 KPU Kabupaten/Kota melakukan unggah data pemilih secara bersamaan. Pada Pilkada tahun ini Sirekap akan diakses lebih dari 304 ribu TPS. Sehingga perlu kiranya disiapkan skenario pengurai trafik.

Keempat, perlu dibangun firewall berlapis untukantisipasi dari serangan DDoS yang dapat membuat server down. DDoS biasanya dilakukan oleh hacker dengan berbagai motif mulai dari motif kebanggaan diri, motif ekonomi maupun motif politik. Dan kelima, perlu disiapkan langkah antisipatif untuk mengatasi TPS di daerah yang mengalami kesulitan jaringan internet.

Ujicoba Sirekap sudah dilaksanakan secara nasional di 270 daerah yang sedang pilkada dan kabarnya akan dilakukan ujicoba jilid 2 pada tanggal 21 November mendatang. Dengan persiapan yang matang Sirekap dapat diimplementasikan dengan baik dan menjadi legacy untuk Pemilu / Pilkada mendatang. Namun, tanpa persiapan yang matang, Sirekap bisa senasib seperti Sipol. □

\*) **Muhammad Johan Komara,**

Pemerhati ICT & Governance, anggota Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNUI DIY

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# Guru Inklusi, Guru Masa Depan

## Dwitya SA Dharma

**GAGASAN** guru yang menghormati keberagaman peserta didik sudah muncul jauh-jauh hari, namun implementasinya masih dipandang tidak membumi. Dalam praktiknya, pendidik masih gagap dalam mengelola keberagaman, menganggarkan kecerdasan kognitif, dan menganak-tirikan afektif. Merespons hal tersebut, sekolah inklusi digadang-gadang menjadi salah satu wahana mengembangkan karakter positif peserta didik. Gagasan ini menjadi penting karena idealnya sekolah inklusi tidak hanya menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), namun juga mengelola keberagaman dari aspek suku, agama, ras, budaya, ekonomi, dan karakter.

Harapan yang disampirkan kepada guru sekolah inklusi menjadi besar. Di samping melayani PDBK, kewajiban mengelola pluralitas menjadi keharusan. Apabila dicermati, kewajiban mengelola keberagaman ini adalah tanggungjawab setiap pendidik di semua sekolah. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi guru inklusi jauh lebih besar karena pluralitas tampak secara nyata. Apabila keberagaman ini tidak dikelola, bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas pengajaran di kelas yang akan berdampak langsung pada mutu sekolah.

### Ujung Tombak

Masa depan digambarkan sebagai lingkungan yang plural, berubah serba cepat, informasi yang bertebaran dimana-mana, dan dinamis. Dengan situasi yang seperti ini diperlukan sosok guru yang menguasai teknologi. Tidak mengganggubah, kreatif, inovasi berkelanjutan, dan tidak gagap pada keberagaman. Guru masa depan yang digambarkan tersebut apabila dicermati terdapat dalam sosok guru sekolah inklusi.

Kompetensi guru menjadi salah satu kunci dalam menumbuhkan nilai-nilai keberagaman dalam kelas inklusi. Guru menjadi ujung tombak pelayanan, peningkatan kualitas SDM, dan internalisasi norma-norma serta nilai positif bagi pe-

serta didik. Dalam konteks sekolah inklusi, guru harus mampu memberikan teladan penghargaan pada keberagaman yang ada di kelas.

Keberagaman peserta didik yang terus meningkat membuat guru sekolah inklusi menjadi pribadi yang mampu menempatkan perbedaan sebagai hal yang wajar. Selain wajib memiliki empat kompetensi guru, guru sekolah inklusi harus memiliki kompetensi dasar mendidik siswa yang berbeda. Itulah mengapa cakupan kompetensi guru inklusi lebih luas daripada guru reguler.

Guru sekolah inklusi diharapkan memiliki kreativitas yang tinggi, etos kerja dan komitmen profesional untuk melayani segala kondisi anak, memiliki etika, dan mampu melihat keberagaman yang ada di kelas sebagai sebuah kekuatan. Di masa sekarang ini, kemampuan merespons keberagaman sebagai sebuah kekuatan sangat penting dikembangkan. Dengan begitu, guru dapat mengajarkan toleransi, saling menghargai, dan mengembangkan nilai kebersamaan kepada peserta didik dalam setting yang alami.

### Semangat Keberagaman

Meningkatkan kualitas guru inklusi merupakan langkah awal dalam upayanya menciptakan sekolah sadar keberagaman. Hal penting yang harus dilakukan pemerintah dan stakeholders adalah menyatukan pemahaman bahwa sekolah inklusi mencakup konsep yang lebih luas daripada sekadar menerima PDBK. Dilandasi pemahaman ini, sekolah harus menempatkan guru sebagai ujung tombak dan siswa sebagai penerima manfaat utama.

Peraturan yang menekankan pentingnya penghormatan pada keberagaman harus terus diawasi sebagai bukti nyata bahwa pemerintah memang serius menggarap pendidikan inklusi. Selain guru dalam lingkup sekolah, pemerintah memiliki peran yang besar dalam pengembangan pendidikan inklusi. Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan dan mendukung terpenuhinya hak-hak PDBK yang akan bersekolah di sekolah reguler, misalnya saja pengawasan penerimaan PDBK di sekolah-sekolah negeri.

Kompetensi guru inklusi yang mumpuni ini bersesuaian dengan semangat keberagaman yang ada di Indonesia. Guru inklusi mampu menempatkan keberagaman peserta didik sebagai wahana internalisasi nilai toleransi dan antidiskriminasi. Walaupun begitu, keberhasilan pengembangan atmosfer multikultur ini tetap memerlukan dukungan dari seluruh komponen sekolah. Komponen ini harus memiliki pemahaman yang sama untuk mendukung terciptanya lingkungan yang menghargai kemajemukan. □

\*) **Dwitya Sobat Ady Dharma,**

Peneliti di Centre for Studies on Inclusive Education, Sekolah Tumbuh.

# Pojok KR

Cuaca ekstrim, waspadai hujan lebat dan angin kencang  
-- **Waspada, bencana ada dimana-mana dalam pelbagai bentuk**  
\*\*\*

Belum rekam e-KTP, warga Wonosobo terancam hak pilihnya  
-- **Siapa bertanggung jawab?**  
\*\*\*

Rencana pembelajaran tatap muka secara bertahap  
-- **Perlu pertimbangan matang dan tidak gegabah menetapkan**

*Berabs*

## Pikiran Pembaca



Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

## Layanan Perpustakaan di Masa Pandemi

**PANDEMI** Covid-19 mengubah tatanan hidup manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan terkena imbasnya. Sebagai konsekuensi agar kehidupan terus berlanjut maka adaptasi adalah perkuncinya. Tidak terkecuali pada bidang perpustakaan.

Perpustakaan yang memiliki fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat juga mesti menyesuaikan keadaan. Dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru, akhirnya pusat-pusat layanan publik seperti perpustakaan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Dengan mulai dibukanya layanan perpustakaan, praktis interaksi fisik akan terjadi meskipun tidak sebanyak sebelum terjadinya pandemi. Pelayanan tertutup kemudian menjadi alternatif agar interaksi antara pustakawan dan pengguna bisa terkontrol dan terminimalisir. Layanan terbatas di masa pandemi ini sudah tentu terdapat kelebihan sekaligus kekurangannya. Kekurangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang berkelanjutan sampai dengan ditemukannya formula layanan yang ideal.

Pelayanan publik di masa pandemi ini tidak sekadar berorientasi pada pelayanan fisik sebagaimana biasanya, tapi juga dalam rangka upaya pemutusan mata rantai Korona dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Untuk itu, kreativitas dari staf sudah tentu menjadi kunci keberhasilan bagi pusat layanan publik dalam memberikan layanannya di masa pandemi ini.

Di era teknologi ini, layanan informasi sangat mungkin dilakukan tidak hanya dengan penyediaan buku sebagaimana biasanya tapi juga menghadirkan beberapa layanan digital yang bisa diakses di mana pun dan kapanpun. Keberadaan teknologi seperti layanan katalog daring, perpustakaan digital, dan portal-portal informasi lainnya yang diperlukan pengguna dapat menjadi alternatif penyediaan informasi di masa pandemi ini. Selain itu, pemanfaatan

media sosial untuk terus memberikan pembaharuan informasi terkait layanan juga menjadi kebutuhan. Di masa pandemi ini hampir seluruh aspek kegiatan manusia direorientasi ke ruang-ruang virtual sehingga perpustakaan pun perlu masuk ke dalam kanal-kanal tersebut.

Pendidikan di masa pandemi yang terus dievaluasi pelaksanaannya juga perlu mendapat dukungan dari perpustakaan. Di tengah pro dan kontra kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi ini, kemauan peserta didik untuk belajar secara mandiri menjadi kunci dari keberhasilan pembelajaran. Perpustakaan sebagai lembaga yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) hadir untuk menemani proses pembelajaran tersebut.

Dengan menyediakan akses informasi baik secara daring maupun luring, perpustakaan hadir menjadi teman belajar sekaligus penyedia referensi yang lengkap di saat pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring. Fasilitas perpustakaan seperti internet gratis dapat publik gunakan untuk menunjang aktivitas virtualnya, mulai dari belajar daring maupun pertemuan daring untuk keperluan lainnya.

Selain diperlukan infrastruktur teknologi dan peralatan yang mendukung terlaksananya protokol kesehatan, kreativitas sumber daya pengelola perpustakaan juga menjadi kunci keberhasilan layanan perpustakaan di masa pandemi. Dalam konteks perpustakaan, pustakawan merupakan ujung tombak dari kegiatan layanan perpustakaan. Pustakawan menjadi penghubung antara pengguna dan sumber informasi relevan yang dicari. Dengan pemahaman tanggung jawab tersebut, pustakawan akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanannya dalam situasi apapun.

\*) **Nazzatul Farhanah MIP, Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman.**

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahr@gmail.com](mailto:naskahr@gmail.com). **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Semarang :** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Banyumas :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.